

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Polewali Mandar memiliki pusat komunitas nelayan di Sulawesi Barat, dengan sekitar 5013 orang yang tinggal atau tinggal di pulau-pulau kecil di wilayah tersebut dan terdapat suatu fenomena *patron-klien* antara punggawa dan nelayan.¹ Studi ini membahas Relasi Kuasa Punggawa Sawi Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini berfokus kepada elit politik yang mempengaruhi pilihan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

Seorang punggawa kapal (*pemilik modal*) dapat dikategorikan sebagai elite politik merupakan posisi di dalam masyarakat yang berada di puncak kekuasaan, baik organisasi sosial, politik, ekonomi, maupun keagamaan atau memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu atau struktur sosial terpenting, yaitu posisi teratas dalam organisasi ekonomi, pemerintah dan sebagainya. Seiring dengan itu, Nazaruddin Syamsuddin mengemukakan pengertian elite. Menurutnya elite adalah tokoh-tokoh puncak di antara para pelaku yang melaksanakan kegiatan-kegiatan politik. Semua elite yang ikut serta dalam memengaruhi proses politik dan memformulasikan kepentingannya dapat disebut sebagai elite.²

Seorang pemimpin kapal (punggawa) memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan dan mengarahkan kelompok lain demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kekuatan dominasi ini bersumber dari berbagai modal yang dimilikinya. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait menciptakan ketergantungan antarmanusia, sehingga tidak ada individu yang dapat sepenuhnya mandiri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh suatu kelompok untuk menjalankan kekuasaan atas kelompok lain melalui kekerasan maupun persuasi.³

Kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan mengakibatkan disparitas antara masyarakat serta kerentanan penghidupan. Sulawesi Barat menempatkan posisi sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-9 di Indonesia. dengan persentase mencapai 11,49%.⁴ Di antara kabupaten-



1. *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada

Gagasan-gagasan Politik Gramsci : Pustaka belajar.

3) Provinsi Termiskin di Indonesia, Ini Penyebabnya! [WWW Document]. URL nagazine/provinsi-termiskin-di-indonesia (accessed 2.21.25).

kabupaten di Sulawesi Barat, Polewali Mandar tercatat sebagai daerah termiskin dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,68%, disusul oleh Kabupaten Majene (14,34%) dan Kabupaten Mamasa (13,77%).⁵ Dibandingkan dengan desa pertanian, tingkat kemiskinan penduduk di desa nelayan jauh lebih tinggi. Mubyarto menunjukkan bahwa kelompok petani lebih maju dibandingkan kelompok nelayan dalam aspek kesejahteraan ekonominya.⁶

Rendahnya pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil, adalah salah satu mata rantai ketidakberuntungan yang dialami oleh pada umumnya nelayan sawi. Kemudian, tidak adanya pekerjaan sampingan dan rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan para sawi, terkait dengan sifat pekerjaan yang menjelmakan keterpencilan (isolasi) nelayan dari dunia ekonomi dan sosial-budaya lainnya. Kelemahan fisik yang umumnya dialami oleh para sawi sebagai akibat dari sifat pekerjaan yang telah mengkondisikan dirinya harus bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam, dengan keadaan gizi yang terbatas, tanpa mengenal istirahat, dalam tempat (ruang) terbuka yang setiap saat diterpa angin dan badai.

Kondisi ruang waktu inilah yang turut menyebabkan kelemahan fisik yang dialami oleh para sawi. Kerentanan penyakit dan kecelakaan di laut atau resiko pekerjaan melaut yang melemahkan kondisi jasmani dan sangat mudah terjadi kecelakaan kerja bagi nelayan sawi, sehingga pinggawa laut diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap sawinya selama berada di laut. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan rentan terhadap penyakit yang diakibatkan keadaan fisik yang lemah. Kondisi ketidakberdayaan nelayan sawi dapat dilihat pada tingginya ketergantungan hidupnya pada punggawa, karena ketidakmampuan (disability) mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mengadakan modal usaha, sehingga harus taat dan patuh terhadap keputusan-keputusan pinggawanya.⁷

Kondisi kehidupan sawi yang penuh ketidakpastian dan kemiskinan struktural menjadi faktor utama yang memperkuat posisi dominan punggawa. Dengan menyediakan bantuan finansial, kesehatan, pendidikan hingga akses pekerjaan. Punggawa mendapatkan loyalitas politik dari para sawi. Akibatnya, demokrasi lokal tidak berjalan secara ideal karena praktik politik yang



an Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2021 [WWW Document]. URL bps.go.id/id/pressrelease/2022/03/16/739/pertumbuhan-ekonomi-sulawesi-ersan.html (accessed 2.21.25).

Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. awali.

ifaatan Ruang Kapasitas Struktur sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan aten Takalar, Sulawesi Selatan. 7(1). 160-161.

seharusnya berdasarkan kesadaran dan kebebasan individu justru berubah menjadi bentuk transaksi kepentingan dan ketergantungan struktural.

Kesejahteraan ekonomi yang tertinggal dalam masyarakat nelayan seringkali diakibatkan oleh kekuasaan politik yang timpang. Relasi kuasa yang timpang dicirikan dengan relasi patron-klien. Patron-klien merupakan sebuah relasi yang menyediakan pertukaran. Patron menyediakan keamanan. Misalnya, keuangan, sosial, akses pasar, dan alat pencaharian sebagai dukungan terhadap klien. Sementara, klien menyediakan tenaga kerja, dan layanan politik⁸. Pertukaran berpola timbal balik yang berkelanjutan ini, dibangun dengan kekuatan yang tidak setara. Hubungan semacam ini mengikat klien baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik.

Dalam kondisi ini, punggawa memanfaatkan posisi sosial dan ekonominya untuk memengaruhi pilihan politik para buruh nelayan. Yang dimana karakteristik masyarakat pesisir sebagian besar bekerja sebagai nelayan banyak menghabiskan waktunya di laut sehingga pengetahuan terkait pelaksanaan pemilu mendatang kurang menjadi konsen mereka, selain itu tingkat pendidikan mereka pada umumnya hanya lulusan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan mereka tentang etos kerja nelayan, visi dan misi bisnis ke depan.⁹ Sawi, yang bergantung secara ekonomi pada punggawa, sering kali tidak memiliki ruang kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Relasi ini bukan hanya menandakan ketimpangan kekuasaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana dominasi politik dibangun secara halus dan berkelanjutan melalui kebudayaan, kebiasaan sosial, dan pengulangan struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Adanya transmisi pengetahuan yang terwariskan secara turun temurun menyebabkan *status quo* kian mengental dalam hal ini budaya. Penyematan status atau simbol yang diberi oleh budaya acapkali membuat masyarakatnya mengerti seperti mereka bertindak. Baik status yang diberikan karena turunan melainkan aspek ekonomi dan lain sebagainya. Penghargaan terhadap suatu hal yang terjadi secara berulang atau kebiasaan dan aktor tertentu yang secara status dianggap istimewa lewat budaya menjadi pintu risikannya problem sosial.

Dalam sistem relasi *pinggawa-sawi*, keduanya dipisahkan dari alat produksi, ketertarikan dan nilai lebih berada di tangan *pinggawa* daripada di tangan *sawi*. Hasil yang diterima oleh seorang *pinggawa* besar



sebagai pemilik modal produksi (mesin, kapal, dan alat tangkap) lebih besar dalam kelompok nelayan yang berskala besar maupun kecil dibandingkan dengan seorang sawi biasa yang hanya bekerja sebagai buruh nelayan.

Sistem hubungan antara seorang punggawa dan para sawinya merupakan pranata sosial yang telah tergabung sejak dahulu. Hubungan tersebut tidak saja bersifat hutang budi, melainkan pranata sosial adalah hubungan timbal balik yang ditimbulkan oleh aktivitas diantara manusia atau kelompok sosial tertentu, yang masing-masing mempunyai tujuan yang sama pula. Keharmonisan pola hubungan kerja tersebut karena dilatar belakangi oleh faktor kekerabatan (keluarga) dan faktor sosio-ekonomis. Kedua faktor inilah yang menyebabkan ketergantungan sawi kepada punggawa.¹⁰ Para nelayan juga rentan terhadap eksploitasi oleh para pemberi pinjaman lokal yang menawarkan fasilitas kredit dengan suku bunga tinggi (Islam 2013). Eksploitasi kelas secara langsung mengarah pada kemiskinan karena para investor mengambil keuntungan sementara komunitas perikanan mengalami kerugian. Ini adalah mekanisme yang mencegah komunitas perikanan menikmati hak sosial, ekonomi, dan politik mereka

Priyono dan Rahardjo (2005) menyatakan bahwa pola hubungan antara pemilik modal (punggawa) dan para nelayan (sawi) bersifat eksploitatif.¹¹ Eksploitasi yang dilakukan oleh punggawa terhadap sawi menyebabkan tingkat pendapatan mereka menjadi rendah, dalam hal ini punggawa memberikan jaminan sosial kepada sawi, yakni punggawa memeberikan pinjaman kepada sawi bila membutuhkan seperti bila ada anggota keluarga yang sakit, atau punya hajatan. Pinjaman yang diberikan adalah salah satu cara mengikat sawi agar memiliki ketergantungan kepada punggawanya dan untuk mengikat sawi agar tidak berpindah punggawa.

Dalam melaut untuk melakukan penangkapan ikan, mereka membawah perbekalan yang akan digunakan saat melaut melaut yaitu bahan makanan dan bahan bakar (solar). Barang-barang tersebut dibeli dari toko panggawa. Harta barang-barang tersebut dijual lebih mahal dari harga biasa dipasaran. Hal ini akan memperbesar biaya produksi (bahan makanan) dan akan mengurangi bagian yang akan diterima sawi (Legiyo, 2018).¹²

Pada umumnya sawi atau buruh nelayan tidak pernah terlepas jeratan dan ekploitasi punggawa yang dipercayainya, karena kehidupan buruh sangat tergantung pada adanya pinjaman dan fasilitas yang diberikan oleh



punggawa, dan punggawa pun memanfaatkan hal tersebut sebagai jaminan dan kontrak kerja untuk mengikat buruh. Dalam hidup keseharian, buruh dan punggawa juga tidak terlepas dari hubungan sosial yang terjalin karena intensitas komunikasi setiap harinya.¹³

Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Kecamatan Balanipa Desa Pambusuang sebagai salah satu masyarakat nelayan yang bercirikan adanya pola kerja yang mengikat -maksudnya adanya hubungan *patron-klien*- antara *Punggawa* (sebutan bagi pemilik modal atau pemilik kapal) dan *Sawi* (sebutan bagi nelayan buruh), yang berkenaan adanya hubungan yang timpang dan tidak seimbang. *Punggawa* sebagai pemegang modal tunggal mensyaratkan adanya kondisi ketergantungan yang implikasinya memunculkan kondisi eksploitatif bagi para *sawi*.

Fenomena relasi punggawa dan sawi di Desa Pambusuang mencerminkan mekanisme ketergantungan struktural sawi yang dimanfaatkan oleh punggawa, meskipun dinamika politik terkini menunjukkan adanya potensi kerja sama saling menguntungkan yang kompleks. Secara fundamental, Punggawa, sebagai elit mikro dan pemilik tunggal modal produksi (kapal, alat tangkap), memiliki otoritas penuh atas seluruh operasional dan bagi hasil, menempatkan sawi pada kondisi kerentanan ekonomi yang tinggi. Kerentanan ini timbul karena pendapatan sawi yang fluktuatif dan tidak menentu dipengaruhi oleh risiko Musim Barat—memaksa mereka terjatuh dalam utang (*panjar*) kepada punggawa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudahan pinjaman yang informal ini secara paradoks menjadi alat kontrol yang melanggengkan ketergantungan struktural. Eksploitasi ini diperkuat oleh ikatan kekerabatan yang membuat sawi terikat secara moral dan enggan berpindah patron, meskipun upah tidak setara.

Di Desa Pambusuang seorang punggawa (pemilik modal) menggunakan modal ekonomi dan sosialnya untuk mengkonsolidasikan blok suara Sawi, mengubah ketergantungan ekonomi menjadi modal tawar politik terhadap figur seperti Anggota DPRD. Melalui mekanisme ini, Punggawa berhasil memfasilitasi program bantuan pemerintah (aspirasi). Dalam dinamika terkini, ketergantungan ini tidak selalu berakhir sebagai eksploitasi murni keberhasilan Punggawa mendapatkan bantuan (seperti alat tangkap) yang meningkatkan hasil tangkapan memberi manfaat kolektif berupa upah yang lebih baik bagi sawi, sehingga menciptakan kerja sama politik yang mengukuhkan yang menjamin stabilitas dan kekuasaan Punggawa



sebagai "pusat" kekuasaan lokal yang terhubung dengan pemerintahan daerah.

Dari adanya bentuk eksploitasi di atas, menciptakan suatu sikap saling tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Dan dalam proses ketergantungan ini sering kali pihak yang berada pada posisi patron mendominasi pihak dari klien, dikarenakan klien berada pada tekanan patron, sehingga klien susah untuk mencapai kemajuan. Seperti yang kemukakan dalam ideologi Marxian bahwa kaum klien atau proletar berada pada tekanan kaum patron.¹⁴

Hal ini menyebabkan hubungan timbal balik antara punggawa dan sawi. Elit politik memiliki peran sebagai patron yang menawarkan perlindungan finansial, sementara nelayan berfungsi sebagai klien yang menawarkan jasa, termasuk dukungan politik. Akibatnya, hubungan ini tidak sejajar. Dari sudut pandang ekonomi dan sosial, Elit politik memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan karena mereka dapat melindungi sawi dengan memenuhi kebutuhan mereka yang paling penting. Perlindungan ekonomi biasanya diberikan dalam bentuk pinjaman uang atau bantuan tanpa biaya seperti biaya kesehatan, sekolah anak nelayan, dan sebagainya.

Selain itu, fenomena ini berdampak negatif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik nelayan. Secara ekonomi, meningkatkan taraf hidup nelayan sulit karena mereka sangat bergantung pada pekerja mereka. Dalam proses demokrasi lokal, seperti pemilihan kepala desa dan anggota legislatif nelayan tidak bebas memilih politik mereka.¹⁵ Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Relasi kuasa punggawa dan sawi dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2024 di desa pambusuang kecamatan balanipa kabupaten polewali mandar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada tesis berikut adalah:

1. Bagaimana pola relasi kuasa punggawa–sawi dalam masyarakat nelayan di Desa Pambusuang?
2. Bagaimana relasi kuasa punggawa memengaruhi perilaku memilih sawi dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian



- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pola Hubungan Kerja (Relasi Patron-Klien) antara Punggawa (pemilik modal/elit mikro) dan Sawi (nelayan buruh) di Kecamatan Balanipa, termasuk basis ketergantungan ekonomi, sosial, dan kekerabatan yang melatarinya.
 - b. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk, mekanisme, dan implikasi relasi kuasa Punggawa dan Sawi dalam konteks Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2024, serta sejauh mana Punggawa berperan dalam mengendalikan/mengarahkan pilihan politik sawi di Desa Pambusuang.
- b. Tujuan Praktis
- a. Memberikan informasi berbasis data kepada pemangku kebijakan dan lembaga pemberdayaan masyarakat tentang dampak ketergantungan dalam relasi punggawa–sawi terhadap kesejahteraan nelayan.
 - b. Menjadi acuan untuk merancang program pemberdayaan yang dapat memutus rantai ketergantungan dan memperkuat posisi tawar buruh nelayan dalam ranah ekonomi dan politik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memperkaya kajian ilmu politik, khususnya studi tentang patronase politik, relasi kuasa lokal, dan demokrasi elektoral di masyarakat pesisir, dengan menghadirkan konteks empiris yang jarang dikaji secara mendalam.
 - b. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi tiga perspektif utama—Teori Patron-Klien (James C. Scott), Teori Ketergantungan (Theotonio dos Santos), dan Teori Elite (Gaetano Mosca)—untuk menjelaskan relasi kuasa punggawa–sawi secara komprehensif dari level mikro hingga struktur politik lokal.
 - c. Secara konseptual, penelitian ini menantang pandangan normatif tentang perilaku memilih sebagai tindakan individual yang sepenuhnya bebas, dengan menunjukkan bahwa pilihan politik dapat terbentuk dalam konteks ketergantungan struktural dan rasionalitas pragmatis.
 - d. Penelitian ini menambah literatur mengenai elit mikro dan politik lokal, dengan menunjukkan bahwa aktor non-formal seperti punggawa memiliki peran strategis dalam menentukan arah politik melalui jaringan sosial-ekonomi tradisional.
- praktis



- a. Bagi pembuat kebijakan (pemerintah daerah dan dinas terkait), penelitian ini memberikan gambaran kritis tentang bagaimana akses bantuan nelayan yang bergantung pada jalur patronase berpotensi memperkuat ketimpangan dan ketergantungan struktural, sehingga dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan bantuan yang lebih transparan, inklusif, dan berbasis kebutuhan langsung nelayan.
- b. Bagi penyelenggara pemilu dan aktor demokrasi lokal, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memahami tantangan demokrasi substantif di masyarakat pesisir, terutama terkait praktik mobilisasi suara melalui relasi ekonomi dan sosial yang timpang.
- c. Bagi masyarakat nelayan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis mengenai posisi mereka dalam struktur relasi punggawa–sawi, serta membuka ruang refleksi mengenai kemungkinan alternatif penguatan kemandirian ekonomi dan politik.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk studi lanjutan mengenai relasi patronase dalam konteks sektor lain, perbandingan antar wilayah pesisir, atau analisis kuantitatif lanjutan mengenai dampak patronase terhadap perilaku memilih dan kualitas demokrasi lokal.

1.5 Gagasan Teori

1.5.1 Teori Elite Gaetano Mosca

Ada kepercayaan bahwa lapisan masyarakat diperintah oleh kelompok kecil orang dengan kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi struktur sosial dan politik yang lengkap. Itu bagus karena Anda dekat dengan pusat kekuasaan. Itu adalah apa yang disebut sebagai elit. Mereka terbagi menjadi dua kelas. Kelas atas terdiri dari elite yang terbagi menjadi yang memerintah dan yang tidak memerintah. Kelas kedua terdiri dari lapisan paling rendah, yang tidak pernah dianggap sebagai elite.¹⁶

Jika kita mempelajari teori elit ini secara menyeluruh, kita akan menemukan bahwa teori elite juga menjelaskan teori kelompok. Teori elit ini bersandar pada gagasan bahwa setiap masyarakat terbagi menjadi dua kategori yang berbeda: (1) sekelompok kecil individu yang memiliki kemampuan untuk memiliki posisi memerintah, dan (2) sejumlah besar orang yang ditaklukkan. Karena itu, teori kelompok ini menunjukkan bahwa dipahami dalam konteks interaksi kelompok yang berbeda.



Oleh karena itu, teori kelompok dapat digunakan untuk menjelaskan fungsi negara dan masyarakat. Selain itu, tujuannya adalah untuk memahami fakta kekuasaan, menurut teori kelompok dan elite ini.¹⁷

Dalam "Elementi di Scienza Politica: The Ruling Class", Gaetano Mosca membahas ide elit politik dan mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat politik, kelompok minoritas mengorganisir kekuasaan, atau "kelas penguasa". Kemampuan organisasi, kekayaan, atau rasa superioritas adalah beberapa kualitas yang membedakan kelompok penguasa ini. Gaetano Mosca menemukan elemen penting dalam pemahamannya tentang elit politik. Ini berarti bahwa dalam setiap masyarakat, kecuali yang paling primitif, ada kelas penguasa, yaitu minoritas yang berkuasa dan memerintah mayoritas. Mayoritas ini memiliki atribut tertentu yang memberi mereka keunggulan, seperti kemampuan organisasi, kekayaan, dan keyakinan yang kuat secara moral dan intelektual. Peringkat ini bervariasi secara sosial dan budaya.¹⁸

Mosca menekankan bahwa basis kekuasaan utama elit terletak pada organisasi mereka, yang memberi mereka kekuatan yang lebih besar daripada mayoritas yang tidak terorganisir. Akibatnya, hubungan dominasi dan subordinasi terbentuk antara kelas penguasa dan kelas yang diperintah. Mosca menyoroti bagaimana elit mempertahankan kekuasaan melalui berbagai mekanisme legitimasi, seperti nilai pribadi, keturunan, atau elektif, yang membantu menciptakan kepatuhan dan mengurangi konflik. Dia juga mengakui bahwa komposisi dan karakteristik elit berbeda-beda dalam berbagai jenis masyarakat dan sistem politik.¹⁹

Praktek elit politik seperti yang digambarkan Mosca jelas terlihat dalam masyarakat yang memiliki hubungan patron-klien yang karaktaris. Karena gagasan bahwa elit politik terkait dengan adanya kekuatan dan dominasi dalam hubungan, praktik-praktik mereka dapat dilanjutkan. Teori elit politik Mosca tentang pembentukan, pemeliharaan, dan operasi kelas penguasa sangat terkait dengan praktik patronase dan hubungan klien. Anggota elit menggunakan hubungan patron-klien sebagai mekanisme penting untuk membangun dan mengkonsolidasikan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan

¹⁷ Bentley, Arthur F. (1908). *The Process of Government: A Study of Social Pressures*. University of



sidah, N. (2023). Gaetano Mosca And "The Rulling Class" Analysis of Elite Group
rment System in Indonesia. *Mimbar Studi Pendidikan dan Riset*, 4(1), 103-111.

39). *The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica)*. Arthur Livingston (Ed. &
rk Company, Inc. (Edisi asli diterbitkan tahun 1896).

dukungan dan kesetiaan klien; ini menciptakan basis dukungan yang terorganisir sesuai dengan penekanan Mosca pada pentingnya organisasi.

Selain membantu elit politik mempertahankan kontrol dan membagi sumber daya, sistem patron-klien menciptakan stabilitas. Dalam beberapa situasi, jaringan patron-klien bahkan dapat merupakan bagian dari "formula politik" yang digunakan elit untuk melegitimasi otoritas mereka melalui praktik patronase di tingkat lokal.

Teori elit politik Mosca dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara bos kapal dan nelayan buruh dalam konteks komunitas nelayan. Bos kapal dalam skala mikro berfungsi sebagai elit yang mengontrol sumber daya penting seperti kapal dan akses ke wilayah penangkapan. Ini memberikan mereka kekuasaan atas nelayan buruh yang menjadi massa yang diperintah dan bergantung pada mereka untuk hidup. Posisi bos kapal diperkuat oleh kemampuan organisasi untuk mengelola operasi penangkapan ikan, sejalan dengan penekanan Mosca pada organisasi sebagai sumber kekuasaan elit.

Sistem patronase, di mana loyalitas dan sumber daya ditukar antara bos kapal dan nelayan buruh, berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan kekuasaan bagi kelompok mikro ini. Tidak banyak mobilitas vertikal antara nelayan buruh dan bos kapal menunjukkan hierarki kekuasaan yang relatif stabil, yang mencerminkan pandangan Mosca tentang kecenderungan oligarkis. Terakhir, norma-norma sosial dan budaya di daerah tersebut seringkali memberikan legitimasi bagi otoritas kapten. Ini sejalan dengan gagasan Mosca tentang "formula politik", di mana para elit menggunakan cerita umum untuk membenarkan posisi mereka.²⁰

Mendekatkan diri kepada bos kapal adalah cara yang cukup efektif karena dia sering menjadi sasaran empuk bagi figur politik yang bergerak maju untuk mencapai tujuan politiknya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hubungan patron-klien antara bos kapal dan nelayan buruh di tingkat lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap politik yang lebih luas. Jaringan kekuasaan ini dapat digunakan untuk kepentingan politik. Bos kapal yang memiliki kontrol dan pengaruh atas para nelayan buruh dapat mengarahkan dukungan elektoral mereka kepada kandidat atau partai tertentu.

Selain itu, bos kapal memiliki jaringan patron-klien yang luas, yang memungkinkan mereka untuk memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan lokal, termasuk manajemen perikanan dan masalah pesisir, karena mereka dapat melobi



1). Patron-Client in Socio Economic Relations of Fisherman in the Coastal Area of Indonesia. *Asian Journal of Agriculture, Environment and Ecology for Sustainability*,

pejabat atau mendukung kandidat yang mereka inginkan. Karena mereka memiliki akses ke sumber daya massa dan lokal, politisi dan partai politik juga dapat mencari dukungan dari bos kapal. Ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Jaringan patron-klien pada tingkat ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk membangun koalisi politik yang lebih besar. Namun, konflik dan rivalitas politik lokal serta pemecah belah komunitas juga dapat disebabkan oleh keberadaan jaringan yang kuat. Meskipun demikian, bos kapal dapat berfungsi sebagai perwakilan informal kepentingan komunitas nelayan dalam arena politik dalam beberapa situasi, meskipun representasi ini mungkin bias.

1.5.2 Teori Patron-Klien James Scott

Menurut Scott, patron dan klien adalah hubungan timbal balik antara dua individu yang memiliki status sosial ekonomi yang berbeda yang dibentuk secara khusus atas dasar saling menguntungkan dan saling memberi dan menerima. Di sini, patron, dengan sumber daya yang dimilikinya, memberikan perlindungan dan keuntungan kepada klien, yang memiliki status sosial yang lebih rendah. Dalam dunia kerja, hubungan patron klien ini ada antara karyawan dan pemilik usaha.

Tiga elemen utama yang mendukung hubungan patron-klien disebutkan Scott. Yang pertama adalah ketidakseimbangan dalam hubungan antara patron dan klien. patron yang lebih kaya dan dihormati daripada klien. Posisi klien adalah orang yang berada dalam hubungan pertukaran yang tidak setara dan tidak dapat membalas sepenuhnya dengan materi. Klien harus membalas jasa patron dengan tenaga dan pengabdian.²¹

Kedua, sifat hubungan langsung dengan patron klien. Patron tidak sembarangan dalam memilih partner atau klien; mereka memilih orang yang sudah dikenalnya untuk bekerja sama dan menjadi kliennya. Salah satu cara yang ditempuh oleh patron adalah dengan meringankan beban pekerjaan yang terkait dengan hubungan kedekatan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan jaminan sosial, uang yang akan diberikan secara timbal balik oleh patron dan klien digunakan. Ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat.

Ketiga, sifat luwes yang menunjukkan adanya kasih sayang yang mendasari hubungan antara patron dan klien, seperti kekerabatan dan persahabatan. "Kekerabatan membantu seseorang mendapatkan sumber daya sosial dan ekonomi. Hubungan patron-klien berakar bertahan bahkan setelah perubahan sosial.



6). *The85). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance.

Hubungan ini akan bertahan selama patron dan klien memiliki sesuatu untuk ditawarkan satu sama lain, yang memastikan bahwa hubungan tersebut akan bertahan.

Teori patron-klien Scott menawarkan lensa yang tajam untuk memahami dinamika hubungan antara individu atau kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar (patron) dan mereka yang membutuhkan dukungan atau akses (klien). Teori ini menyoroti bagaimana hubungan ini seringkali ditandai oleh pertukaran asimetris, di mana patron memberikan bantuan, perlindungan, atau sumber daya sebagai imbalan atas loyalitas, dukungan politik, atau jasa tertentu dari klien. Scott menekankan bahwa relasi patron-klien seringkali tidak setara sejak awal dengan patron yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan syarat dan manfaat dari pertukaran tersebut, meskipun tampak sebagai hubungan yang menguntungkan.

Selain itu, Scott menekankan bahwa hubungan patron-klien tidak selalu monolitik atau statis. Klien seringkali tidak melakukan apa-apa secara pasif; sebaliknya, mereka aktif mencari dan memanfaatkan berbagai patron untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi ketergantungan mereka pada satu pihak. Dengan pendekatan seperti ini, klien memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak dan menghindari mengeksploitasi terlalu banyak. Selain itu, jaringan patron-klien dapat menghasilkan struktur sosial dan politik yang rumit, yang berdampak pada pembagian sumber daya, akses kekuasaan, dan bahkan stabilitas suatu negara atau komunitas.²²

Oleh karena itu, teori patron-klien Scott memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk menganalisis berbagai fenomena sosial dan politik, mulai dari interaksi lokal hingga dinamika kekuasaan di tingkat nasional. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hubungan patron-klien mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, kita harus memahami asimetri kekuasaan, strategi klien, dan pembentukan jaringan.

Dalam konteks hubungan antara punggawal dan sawi, teori patron-klien Scott dapat menjadi pisau analisis yang relevan untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam ranah politik. Sebagai pihak yang memiliki sumber daya finansial dan status yang lebih tinggi, punggawa biasanya memberikan akses pekerjaan, perlindungan di laut, atau bahkan senjata kepada sawi. Pekerja dapat mengharapkan loyalitas dan sebagai imbalannya, termasuk dalam memilih politik.



Dalam kerangka patron-klien, pengarahan pilihan politik oleh punggawa kepada sawi adalah bagian dari pertukaran asimetris. Ketika sawi tidak memiliki akses ke informasi atau cara lain untuk mendapatkan uang, mereka cenderung bergantung pada punggawa. Karena ketergantungan ini, punggawal dapat memanfaatkan kerentanan ini untuk mempengaruhi pilihan politik para sawi. Dengan dukungan politik dari para sawi ini, posisi bos kapal dapat diperkuat dalam jaringan kekuasaan yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun dalam hubungannya dengan beberapa pihak politik.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa teori Scott juga menekankan bahwa klien mungkin bukan pihak yang sepenuhnya pasif. Untuk mengatasi tekanan atau arahan politik dari bos kapal, sawit nelayan mungkin menggunakan pendekatan unik. Mereka mungkin menunjukkan kepatuhan secara lahiriah, tetapi secara diam-diam mereka mengambil pilihan politik yang berbeda, atau bahkan mencari patron lain yang dapat memberikan keuntungan atau perlindungan yang lebih baik. Dengan demikian, meskipun dalam konteks politik, ketidaksetaraan kekuasaan seringkali memengaruhi hubungan antara punggawa dan buruh nelayan, dinamika yang terjadi dapat menjadi lebih kompleks dan melibatkan berbagai strategi adaptasi dari pihak sawi.

1.5.2 Teori ketergantungan Theotonio dos Santos (Dependencia Teory)

Teori ketergantungan pertama kali muncul di Amerika Latin. Teori ini awalnya dibuat sebagai tanggapan atas program yang gagal dilakukan oleh ECLA (United Nations Economic Commission for Latin America) pada awal tahun 60-an. Organisasi ini didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Amerika Latin dengan memasukkan teori modernisasi yang telah digunakan dengan baik di Eropa. Tanggapan ilmiah terhadap perspektif Marxis klasik tentang pembangunan di negara maju dan negara berkembang juga merupakan sumber teori ketergantungan. neo-Marxisme yang mendukung ketergantungan ini pada teori. Marxisme sering dikaitkan dengan teori ketergantungan, yang menyatakan bahwa negara inti menguntungkan negara yang lebih lemah.

Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank adalah tokoh penting dalam teori ketergantungan, yang mendefinisikan ketergantungan sebagai ketidak seimbang antara negara maju dan negara miskin dalam kedua kelompok negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa di negara maju bersamaan dengan kapitalisme mereka ya hasil dari kemajuan negara Dunia Ketiga. Jika sesuatu maju, negara berkembang juga akan mendapat dampaknya, di negara berkembang, belum tentu negara maju akan



menerima dampaknya. sebuah hubungan yang tidak menghasilkan hasil yang sama. Artinya, dampak berkembang pembangunan di negara maju dapat berdampak baik atau buruk pada negara.²³

Negara dunia pertama atau negara inti sangat bergantung pada ekonomi negara terpinggirkan atau dunia ketiga, yang dijelaskan oleh teori ketergantungan, juga dikenal sebagai teori ketergantungan. Ketergantungan terbentuk ketika keadaan inti dan periferal berinteraksi satu sama lain. Negara bagian inti memiliki kemampuan untuk tumbuh secara mandiri. Sama sekali, perkembangan negara inti sangat bergantung pada perkembangan negara pinggiran. Hal ini dapat berdampak baik atau buruk pada kemajuan negara mereka. Menurut teori ketergantungan, status negara-negara yang terpinggirkan dari pengaruh ekonomi global merupakan faktor utama yang menyebabkan mereka terbelakang.²⁴

Osvaldo Sunkel (1969)* menyebut ketergantungan perkembangan ekonomi sebuah negara sebagai hasil dari berbagai pengaruh eksternal, termasuk budaya, politik, dan ekonomi, terhadap kebijakan pembangunan nasional.²⁵ Susanne Bodenheimer mengatakan ketergantungan adalah proses yang terus berlanjut. Ia juga mengatakan bahwa Amerika Latin telah menjadi bagian dari struktur internasional yang didominasi oleh negara-negara yang sekarang berkembang sejak abad ke-16. Latin tertekan oleh berbagai hubungan dengan struktur internasional.²⁶

Teori ketergantungan menekankan bahwa komponen pembangunan dari luar sangat penting. Menurut Robert A. Packenham, kekuatan teori ketergantungan menekankan pada aspek internasional, mempersoalkan akibat dari politik luar negeri (industri terhadap pinggiran), mengaitkan perubahan internal negara pinggiran dengan politik luar negeri negara maju, dan mengaitkan antara negara pinggiran dan negara maju

Teori dependensi menekankan hubungan masyarakat yang ada, termasuk struktur sosial, kultur, ekonomi, dan politik. Menurut asumsi yang mendasari teori ini, pembangunan dan keterbelakangan adalah konsep yang saling terkait. Ketika digunakan, istilah "ketergantungan" digunakan untuk menunjukkan bahwa kemajuan di daerah pusat, atau negara maju, sebanding dengan keterbelakangan di daerah periperal, atau negara dunia ketiga, yang disebabkan oleh peristiwa sejarah yang disengaja. Ini termasuk kerangka



merican Economic Association (May , 1970) The American Economic Review 370), 6.
se of Dependency Theory, The State and Development in the Third World, 31.2
i.org/10.2307/j-ctt7zv88r.4>.
ional Development Policy and External Dependence in Latin America. *The Studies*, 6(1), 23–48.
)). Dependency and Imperialism: The Roots of Latin American
LA Newsletter, 4(3), 18–27.

teori dari pemikiran Marx tentang eksploitasi. Negara-negara maju adalah penyebab negara-negara tertinggal. Menurut teori ini, hubungan antara Negara Dunia Pertama dan Negara Dunia Ketiga tidak seimbang karena Negara Dunia Pertama selalu berusaha memindahkan kekayaan ekonomi mereka dari negara pinggiran ke negara sentral. Akibatnya, negara-negara Dunia Ketiga menjadi miskin, terbelakang, dan tidak stabil secara politik dan ekonomi.²⁷

a. Ketergantungan Ekonomi Nelayan

Teori ketergantungan Theotonio dos Santos awalnya dibuat untuk memahami tantangan pembangunan di negara-negara periferi dalam hubungannya dengan negara-negara pusat. Ketika kita melihat lebih dekat pada dinamika kekuasaan di tingkat mikro, terutama dalam masyarakat nelayan, teori ini sangat relevan. Di Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Pambussuang, hubungan antara pemilik modal (punggawa) dan nelayan kecil serta buruh nelayan (sawi) seringkali mencerminkan pola ketergantungan yang sama; ketidaksetaraan menjadi penghalang utama bagi kemajuan dan kemandirian kelompok yang lebih lemah.

Dos Santos menekankan bahwa posisi negara periferi dalam sistem ekonomi global membatasi pilihan pembangunan mereka, dan bahwa struktur punggawa yang ketat menghalangi pembangunan internal sawi. Pekerja cenderung memiliki kepemilikan perahu, alat tangkap, dan akses ke jaringan pemasaran yang menguntungkan. Secara inheren, nelayan dengan sumber daya terbatas tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, mendapatkan akses ke pasar yang lebih baik, dan, pada akhirnya, menentukan nasib ekonomi mereka sendiri.

Seorang punggawa, menurut perspektif Marxis, memiliki kekayaan yang memungkinkannya melegitimasi kekuasaan mereka. Legitimasi ini memungkinkan eksploitasi sawi yang memanfaatkan sarana produksi milik punggawa. Dalam konsep Marxian, investasi modal punggawa terbagi menjadi dua tujuan utama: pengadaan alat produksi dan pembayaran upah bagi sawi yang menyediakan tenaga kerja. Sawi hanya dapat bergantung pada kemampuan kerja mereka karena mereka tidak memiliki aset produktif.²⁸ Kebutuhan setiap pihak untuk menjalin aliansi dengan orang atau kelompok yang memiliki status sosial, kekayaan materi, atau kekuatan yang lebih tinggi akan lebih mudah menentukan hubungan punggawa-sawi. Oleh karena itu, dasarnya adalah simbiosis, atau saling membutuhkan.



²⁷ Ketergantungan (Dependency Theory)', Sosiologi 79, 2020
www.sosiologi.com/2020/07/teori-ketergantungan-dependency-theory.html [accessed 7 July 2020]
²⁸ in buku Bakry. Hal.172-173.

²⁹ Kritis Das Kapital Karl Marx (Jakarta: Teplok Press, 1999), hlm.58.

Dalam konteks ketergantungan, elemen penting adalah ketergantungan ekonomi sawi terhadap punggawa, seringkali menimbulkan perasaan memiliki kewajiban moral atau hutang budi. Punggawa cenderung memberikan lebih banyak manfaat atau barang kepada sawi sebagai pihak yang mengendalikan sumber daya ekonomi secara lebih besar, tetapi sawi seringkali tidak mampu memberikan kompensasi sepadan. Ketidakmampuan sawi menyebabkan rasa berhutang budi kepada punggawa, yang menyebabkan ketergantungan. Ketika kekuasaan digunakan, orang-orang yang mengontrolnya dan orang-orang yang ditargetkan olehnya bergantung satu sama lain.

Struktur ketergantungan ini menghasilkan eksploitasi surplus ekonomi. Nelayan kecil dan petani sawi menghadapi banyak risiko dan kerja keras, tetapi hasilnya tidak sebanding. Pemilik modal mengambil sebagian besar keuntungan dari tangkapan laut, yang kemudian menjadi lebih kaya, sementara nelayan tetap dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan. Ketergantungan ini tidak akan hilang. Nelayan kecil tidak dapat membangun ekonomi mereka sendiri karena mereka tidak memiliki modal dan pasar yang cukup. Mereka masih membutuhkan pemilik modal untuk beroperasi, dan sistem saat ini justru memperkuat posisi pemilik modal, menciptakan lingkaran setan ketergantungan yang sulit diputuskan.²⁹

b. Ketergantungan Sosial Nelayan

Istilah "ketergantungan sosial" pasti sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak orang berpikir berbeda tentang ketergantungan sosial. Hubungan interpersonal membentuk ketergantungan sosial. Ketidakmampuan sosial yang menyebabkan ketergantungan terhadap negara lain dengan hubungan ekonomi disebut ketergantungan sosial. Ini tidak hanya melihat hubungan sosial dan ketergantungan, tetapi juga hubungan ekonomi. Dalam hal ini, ketergantungan sosial terdiri dari dua komponen yang saling berhubungan: sosial dan ekonomi. Aspek sosial tidak dapat terlepas dari kondisi ekonomi yang terjadi dalam suatu ketergantungan, begitu pula sebaliknya.

Hubungan antara punggawa dan sawi terdiri dari rasa ketergantungan dan bantuan punggawa untuk membantu sawi mendapatkan uang untuk hidup. Selain itu, karena sawi mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil tangkapan ikan, tingkat keuntungan yang diterima sawi atau sedikit tangkapan juga ditentukan. Upah yang



diberikan akan lebih besar jika hasil tangkapan banyak, tetapi lebih sedikit jika hasil tangkapan sedikit.

Mengenai hubungan sosial masyarakat nelayan merupakan hubungan mulai dari hubungan persahabatan, hubungan pertetanggaan dan hubungan patron klien yang mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan baik itu dari golongan punggawa maupun sawi. Adapun dari hubungan kerja dan pembagian hasil tersebut akan mempengaruhi hubungan kedepannya antara punggawa dan sawi ternyata dari pengaruh hubungan tersebut masih tetap berlanjut karena disini sawi tidak merasa keberatan sebaliknya malah sawi merasa punggawa telah menolong atau membantu pendapatan atau ekonomi keluarga. Yang disini memberi arti bahwa punggawa memberikan pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan oleh sawi. Maka bisa dikatakan bahwa hubungan punggawa sawi ini akan terus berlanjut dan tetap berjalan seperti yang telah ada atau struktur ini akan selalu berbentuk patron klien.³⁰

Masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir, yang merupakan area transisi antara darat dan laut. Masyarakat nelayan adalah sistem yang terdiri dari kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial, dan mereka juga menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dengan sistem nilai dan simbol kebudayaan. Ini adalah komponen kebudayaan yang membedakan masyarakat nelayan dari masyarakat mancing. Kelangsungan hidup sebagian besar masyarakat pesisir bergantung pada pengelolaan potensi sumber daya kelautan.

Karena masyarakat nelayan adalah bagian sosial yang sangat penting dari masyarakat pesisir, perilaku sosial dan kebudayaan masyarakat pesisir sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka miliki. Sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat menjadi ranah perempuan), struktur relasi patron-klien yang kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi terbaik, kompetitif dan berorientasi prestasi, menghargai keahlian, kekayaan, dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, dan solidaritas sosial yang tinggi adalah ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan.³¹

Ini menunjukkan bahwa punggawa membantu dan mengontrol seluruh sistem kehidupan sawi, karena mereka bergantung pada sawi untuk



Simsa-Putra, M.A., M.Phil., Ph.D. 1996. "Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan: 9". *Prisma*.

Isi Mutual Masyarakat Nelayan Antara Punggawa Dan Sawi Di Kecamatan Bonto Bahari ismu Makassar.

mendapatkan uang untuk hidup dan keluarga mereka. Menurut Abu Hamid (1992:350) dalam bukunya "Sistem Kebudayaan dan Peranan Pranata Sosial dalam Masyarakat Orang Makassar," hubungan punggawa sawi berasal dari tradisi lama yang berfokus pada hubungan sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh hutang budi. Dia berpendapat bahwa sistem tradisi ini mendukung pelestarian kehidupan nelayan. Karena sawi menganggap punggawa sebagai orang yang menjaga, melindungi, dan memimpin mereka.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sejumlah rangkuman atau analisis literatur yang berkaitan dengan suatu bidang atau topik tertentu. Kehadiran suatu penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam sebuah penelitian karena dapat memperkuat kajian ilmiah dan berfungsi sebagai perbandingan dalam analisis yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji oleh peneliti:

Pertama, (Firzan Muhammad, 2017) dengan judul "*Hubungan Patron Klien Masyarakat Nelayan di Kampung Tanjung Limau Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.*" Studi ini mencoba menganalisis sejauh apa hubungan relasi patron-klien ini, dengan mendasarkan hubungannya pada tiga aspek, *pertama*, hubungan ekonomi, *kedua*, hubungan sosial, dan *ketiga*, hubungan politik. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan pengambilan sumber data melalui wawancara dan observasi mendalam. Sementara teori yang digunakan dalam menganalisa pola hubungan patron-klien ini yakni teori Patron-Klien (Scott, 1972), Ketidakseimbangan Kekuasaan (Wolf, 1966 & Kitchelt, 200) dan Teori Relasi Instrumental (Pelras, 2009).³²

Kedua, (Manjib, Chalida, 2021) dengan judul "*Strategi Kelompok Nelayan dalam Mereduksi Politik Patron Klien di Kabupaten Maros.*" Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi politik kelompok nelayan Kabupaten Maros dalam berupaya mengurangi ketergantungan atas "*punggawa*" atau pemilik modal dalam sistem perikanan. Penelitian ini juga mencoba mengeksplorasi sejauh apa strategi ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan demokrasi nelayan terutama dalam proses politik elektoral. Studi ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara informan, observasi mendalam dan studi kepustakaan. Sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah



teori relasi-kuasa milik (Scoot, 1972) teori politik patronase (Pelras, 2009), dan teori demokrasi (Mishler & Rose, 2001)³³

Ketiga, (Idham Irwansyah, Sopian Tamrin, Riska Damayanti, 2023) "Mekanisme Ketergantungan Dalam Reproduksi Relasi Kuasa Punggawa Terhadap Sawi". Penelitian menggunakan kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teori Michael Foucault. Dalam penelitian ini menganalisis mekanisme kuasa "punggawa" terhadap "sawi" dalam masyarakat nelayan di Bajoe, Kabupaten Bone . Pola relasi kuasa patron-klien .Faktor-faktor yang menyebabkan ketergantungan "sawi" pada "punggawa" (kekerabatan dan ekonomi) .Praktik pinjam-meminjam yang memperkuat posisi "punggawa" sebagai pemilik modal dan kuasa ³⁴

Keempat, (Ratih Rahmawaty, dkk, 2024) dengan judul "Hubungan Sosial Ketergantungan Nelayan Terhadap Tauke Di Desa Mantang Lama". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian menemukan adanya Ketergantungan nelayan terhadap "tauke" di Desa Mantang Lama, Dampak ketergantungan pada transaksi ekonomi dan masyarakat pesisir, Faktor-faktor yang menyebabkan ketergantungan, seperti pinjaman modal dan fasilitas dari "tauke"³⁵

Kelima, (Adi Suryadi, 2023) Struktur Ketergantungan dan Marjinality Pada Komunitas Nelayan Tangkap Tradisional : Studi Kasus Di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori struktural fungsionalisme. Penelitian ini berfokus pada struktur sosial masyarakat nelayan di Desa Sungai Kupah, yang mencakup stratifikasi sosial dan pola interaksi antar kelompok nelayan. Secara khusus, penelitian ini menyoroti bagaimana struktur sosial yang ada menciptakan ketergantungan dan marjinalitas pada kelompok nelayan kecil dan buruh nelayan.³⁶

Keenam, (Vicky Anilta, 2019), Dinamika Hubungan Patron Klien Nelayan Di Pantai Utara Jawa : Studi Kasus Di Kecamatan Wonokerto

³³ Abdul Chalida, Taufiq Manjib. 2021. Strategi Kelompok Nelayan dalam Mereduksi Politik Patron Klien di Kabupaten Maros. Vol. 9 No. 1 Maret 2021, Hal. 60-73



S., & Damayanti, R. (2023). MEKANISME KETERGANTUNGAN DALAM KUASA PUNGGAWA TERHADAP SAWI. *Konferensi Nasional Sosiologi X 2023*, 1-14.

ma, W. H., Apriadi, R., Sevriyansah, T., Ferdi, & Wahyuni, S. (2024). Hubungan elayan Terhadap Tauke Di Desa Mantang Lama. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora* :58-263.

uktur Ketergantungan dan Marjinality Pada Komunitas Nelayan Tangkap Di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *sial dan Humaniora*), 2(2), 195-206.

Kabupaten Pekalongan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan bersandar pada teori Patron-Client. Penelitian ini membahas mengenai pola hubungan patron klien di kalangan nelayan di TPI Jambean Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.³⁷

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Temuan
1.	Firzan Muhammad, 2017	"Hubungan Patron Klien Masyarakat Nelayan di Kampung Tanjung Limau Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang."	Peneliti menemukan adanya ketimpangan kekuasaan dan ekonomi antara punggawa dan nelayan. Kemudian adanya sistem yang mempertahankan kemiskinan nelayan melalui hubungan ketergantungan serta kurangnya upaya untuk meningkatkan kemandirian nelayan dalam aspek ekonomi dan sosial.
2.	Manjib, Chalida, 2021	<i>"Strategi Kelompok Nelayan dalam Mereduksi Politik Patron Klien di Kabupaten Maros."</i>	Problem yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa adanya ketimpangan ekonomi dan sosial akibat hubungan patron-klien masih kuat di masyarakat nelayan, punggawa menggunakan pengaruh ekonomi mereka untuk mengontrol perilaku politik nelayan, serta sebagian nelayan



			berusaha melawan dominasi ini dengan membentuk kelompok nelayan yang lebih mandiri, meskipun masih menghadapi tekanan dari punggawa
3.	Idham Irwansyah, Sopian Tamrin, Riska Damayanti, 2023	<i>"Mekanisme Ketergantungan Dalam Reproduksi Relasi Kuasa Punggawa Terhadap Sawi"</i>	Menganalisis mekanisme kuasa "punggawa" terhadap "sawi" dalam masyarakat nelayan di Bajoe, Kabupaten Bone . Pola relasi kuasa patron-klien .Faktor-faktor yang menyebabkan ketergantungan "sawi" pada "punggawa" (kekerabatan dan ekonomi) .Praktik pinjam-meminjam yang memperkuat posisi "punggawa" sebagai pemilik modal dan kuasa Metode dan Pendekatan: • Pendekatan kualitatif • Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi • Teori Michael Foucault



4.	Ratih Rahma waty, dkk, 2024	<i>"Hubungan Sosial Ketergantungan Nelayan Terhadap Tauke Di Desa Mantang Lama"</i>	Ketergantungan nelayan terhadap "tauke" di Desa Mantang Lama , Dampak ketergantungan pada transaksi ekonomi dan masyarakat pesisir , Faktor-faktor yang menyebabkan ketergantungan, seperti pinjaman modal dan fasilitas dari "tauke" Metode dan Pendekatan: Metode penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data: wawancara dengan nelayan dan observasi Sumber dan konten terkait
5	Adi Suryadi , 2023	<i>Struktur Ketergantungan dan Marjinality Pada Komunitas Nelayan Tangkap Tradisional : Studi Kasus Di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya</i>	Penelitian ini berfokus pada struktur sosial masyarakat nelayan di Desa Sungai Kupah, yang mencakup stratifikasi sosial dan pola interaksi antar kelompok nelayan. Secara khusus, penelitian ini menyoroti bagaimana struktur sosial yang ada menciptakan ketergantungan dan marjinalitas pada kelompok nelayan kecil dan buruh nelayan. Metode dan Pendekatan: Penelitian ini menggunakan metode



			pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitiannya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sumber dan konten terkait Teori Struktural fungsionalisme
6.	Vicky Anilta, 2019	<i>Dinamika Hubungan Patron Klien Nelayan Di Pantai Utara Jawa : Studi Kasus Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan</i>	Penelitian ini membahas mengenai pola hubungan patron klien di kalangan nelayan di TPI Jambean Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Metode dan Pendekatan: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori Patron-Client

Merujuk pada penelitian terdahulu diatas tentang relasi patron-klien dalam masyarakat nelayan pada umumnya masih berfokus pada dimensi sosial dan ekonomi, serta belum secara komprehensif menelaah bagaimana hubungan tersebut bertransformasi menjadi instrumen politik di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelusuran literatur, penelitian-penelitian sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar.

Pertama penelitian yang menyoroti pola hubungan patron-klien dalam dimensi sosial ekonomi, sebagaimana dilakukan oleh *Firzan Muhammad Bontang* dan *Vicky Anilta (2019)* di Pekalongan. Kedua



maparkan bagaimana punggawa sebagai pemilik modal ominan terhadap nelayan kecil (sawi), dan bagaimana t menciptakan ketergantungan yang bersifat ekonomi serta duanya belum mengkaji secara mendalam implikasi politik

t.

Kedua penelitian yang berfokus pada strategi dan perlawanan terhadap sistem patronase, seperti penelitian *Chalida Manjib (2021)* di Kabupaten Maros. Studi ini menjelaskan upaya kelompok nelayan dalam mengurangi ketergantungan terhadap punggawa, namun analisisnya masih terbatas pada aspek sosial dan ekonomi serta belum mengaitkan fenomena patronase dengan praktik politik elektoral secara langsung.

Ketiga penelitian yang menganalisis mekanisme kekuasaan dan struktur ketergantungan, seperti yang dilakukan *Idham Irwansyah, Sopian Tamrin, dan Riska Damayanti (2023)* di Kabupaten Bone; *Ratih Rahmawaty dkk. (2024)* di Desa Mantang Lama; dan *Adi Suryadi (2023)* di Kubu Raya. Ketiga penelitian ini menekankan bagaimana relasi patron-klien melahirkan ketergantungan ekonomi dan sosial yang bersifat struktural, serta bagaimana posisi patron dipertahankan melalui praktik ekonomi dan kultural. Namun, ketiganya belum mengaitkan relasi tersebut dengan konteks kekuasaan politik lokal serta belum menggunakan kerangka teori yang menghubungkan ketergantungan ekonomi dengan reproduksi kekuasaan politik.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya menelaah relasi patron-klien punggawa–sawi dalam konteks politik elektoral, khususnya pada Pemilihan Anggota Legislatif 2024 di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Relasi ini tidak hanya dimaknai sebagai hubungan ekonomi atau sosial, tetapi juga sebagai mekanisme konsolidasi kekuasaan politik yang berlangsung di tingkat lokal.

Secara teoretis, penelitian ini memadukan tiga teori utama yang belum pernah digunakan secara simultan oleh penelitian terdahulu, yakni:

1. **Teori Patron-Klien (James C. Scott, 1972)** digunakan untuk menjelaskan pola pertukaran tidak setara antara punggawa dan sawi, serta bagaimana ketergantungan ekonomi dan sosial tersebut menjadi dasar loyalitas politik.
2. **Teori Ketergantungan (Theotonio dos Santos)** diterapkan untuk melihat relasi punggawa–sawi dalam kerangka ketimpangan struktural, di mana punggawa berfungsi sebagai “pusat” kekuasaan lokal yang menciptakan kondisi keterbelakangan ekonomi bagi sawi sebagai “periferi”.
3. **Teori Elit (Gaetano Mosca)** digunakan untuk menjelaskan dominasi sebagai elite mikro yang mampu mengontrol massa (sawi) arena politik, serta bagaimana elite minoritas ini rankan kekuasaan melalui jaringan patronase tradisional.



tiga teori tersebut menjadikan penelitian ini memiliki gap aktual yang kuat dibandingkan penelitian sebelumnya. Teori

Patron-Klien memberikan pemahaman pada tingkat relasi mikro, teori Ketergantungan memperluas analisis pada struktur ekonomi-politik makro, sementara teori Elit menjelaskan mekanisme dominasi dan reproduksi kekuasaan politik lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan ketimpangan sosial-ekonomi sebagaimana studi sebelumnya, tetapi juga mengungkap bagaimana hubungan punggawa–sawi berfungsi sebagai instrumen politik dalam demokrasi lokal.

1.7 Kerangka Berpikir

Bagian ini bertujuan untuk menyajikan kerangka berpikir yang akan menjadi landasan konseptual dalam mengarahkan penelitian ini. Kerangka berpikir merupakan struktur konseptual yang memadu penelitian ini dan membantu memahami hubungan antara berbagai aspek yang akan dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir akan membahas teori yang relevan serta konsep kunci yang akan digunakan dalam menganalisis Elit Politik Dalam Menentukan Pilihan Politik Buruh Nelayan (Sawi) Di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

Kerangka berpikir ini berangkat dari pemahaman bahwa seorang punggawa dapat dikatakan sebagai seorang elit politik hal ini dilihat dari bagaimana seorang punggawa memiliki hubungan dominasi yang dimana hubungan antara punggawa sawi ini bukanlah sekadar hubungan kerja biasa. Ada dinamika kekuasaan dan ketergantungan yang terbentuk di dalamnya. Punggawa, karena memiliki modal berupa kapal, alat tangkap, dan akses ke pasar, memegang kendali atas sumber daya krusial bagi mata pencaharian sawi. Sawi, di sisi lain, dengan keterbatasan modal dan akses, menjadi bergantung pada punggawa untuk bisa melaut dan mendapatkan penghasilan.

Ketergantungan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, di mana sawi membutuhkan pekerjaan dan pinjaman dari punggawa. Lebih jauh, ketergantungan ini bisa merambah aspek sosial, di mana punggawa mungkin memberikan jaminan informal atau bantuan saat kesulitan, menciptakan ikatan hutang budi. Bahkan, dalam ranah politik lokal, posisi punggawa sebagai figur yang memiliki pengaruh dan sumber daya dapat memengaruhi pilihan politik sawi.



Kerangka berpikir ini melihat bahwa hubungan punggawa dan sawi ini, bentuk ketergantungan yang menyertainya, berpotensi nandirian sosial ekonomi buruh nelayan. Kemandirian bisa terhambat karena keterbatasan akses modal dan kerja. Kemandirian sosial mereka pun bisa terpengaruh

karena kurangnya akses terhadap layanan dasar atau partisipasi dalam pengambilan keputusan di komunitas.

Keterlibatan punggawa sebagai pemilik modal juga diasumsikan memiliki pengaruh terhadap pilihan politik buruh nelayan. Pengaruh ini bisa terjadi melalui berbagai cara, mulai dari mobilisasi dukungan secara langsung, pengarahan pilihan dalam pemilu, hingga pemberian insentif politik berupa janji atau bantuan. Otoritas dan pengaruh sosial punggawa dalam komunitas juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk preferensi politik sawi.

Kerangka berpikir ini secara sederhana penulis ingin menjelaskan bahwa hubungan antara punggawa dan sawi, yang ditandai dengan ketergantungan, memiliki dua dampak utama. Pertama, menghambat kemandirian sosial ekonomi buruh nelayan karena keterbatasan akses dan kontrol sumber daya. Kedua, memengaruhi pilihan politik buruh nelayan karena posisi dan pengaruh punggawa sebagai pemilik modal dalam konteks politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana kedua hal ini terjadi.



BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Studi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjangkatkan studi kasus sebagai pendekatan dalam memahami studi yang ingin dikaji. Secara dasar, tujuan utama dari penelitian ini bertujuan dalam menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur yang sistematis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dengan meneliti berbagai lingkungan sosial serta individu yang hidup di dalamnya.³⁸ Para peneliti kualitatif terutama tertarik pada bagaimana manusia mengatur diri mereka sendiri dan lingkungannya serta bagaimana mereka memahami dunia di sekitar mereka melalui simbol, ritual, struktur sosial, peran sosial, dan sebagainya.

Metode penelitian terhadap manusia akan memengaruhi cara individu-individu tersebut dipahami.³⁹ Jika manusia dipelajari dalam bentuk yang disederhanakan secara simbolis dan dikumpulkan secara statistik, ada risiko bahwa kesimpulan yang dihasilkan—meskipun secara matematis akurat—tidak mencerminkan realitas sebenarnya.⁴⁰

Prosedur kualitatif memungkinkan akses terhadap fakta-fakta yang tidak dapat dikuantifikasi tentang individu yang diamati dan diwawancarai oleh peneliti, atau yang direpresentasikan melalui jejak pribadi mereka, seperti surat, foto, artikel koran, dan buku harian. Dengan demikian, teknik kualitatif memberi kesempatan bagi peneliti untuk memahami persepsi dan cara pandang orang lain serta mengeksplorasi bagaimana individu mengatur dan memberi makna pada kehidupan sehari-hari mereka.

Bagi (Douglas, 1976) analisis data kualitatif memungkinkan peneliti untuk membahas secara mendalam berbagai bentuk dan proses sosial yang digunakan manusia untuk menciptakan dan mempertahankan realitas sosial mereka.⁴¹ (Bruce Lawrance, 2001) juga menambahkan jika penelitian berkualitas tinggi adalah penelitian yang dapat diuji kembali oleh peneliti lain yang meneliti fenomena yang sama, baik dengan metode yang serupa maupun berbeda.⁴² Itulah kenapa, metode kualitatif, adalah upaya dalam membuka ruang dialektis dalam dunia penelitian, dan memungkinkan untuk



Qualitative Research Methods for The Social Sciences. Needham: Allyn & Bacon.
75. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
» Sociological Imagination. Oxford University Press, New York.
Investigative social research: Individual and team field research. Sage.
Qualitative Research Methods for The Social Sciences. Needham: Allyn & Bacon.

memperkaya dan mengeksplorasi penelitian-penelitian terdahulu yang secara isu kajian dan pembahasan yang serupa atau sama.

Studi kasus atau '*case-study*', adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti. Patton (2002) menambahkan bahwa studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu.

Dengan metode ini peneliti diharapkan menangkap kompleksitas kasus tersebut. Kasus itu haruslah tunggal dan khusus. Ditambahkannya juga bahwa studi ini dilakukan karena kasus tersebut begitu unik, penting dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Dengan memahami kasus itu secara mendalam maka peneliti akan menangkap arti penting bagi kepentingan masyarakat, organisasi atau komunitas tertentu.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pambussuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, karena beberapa alasan. Pertama, Kecamatan Pambussuang merupakan komunitas pesisir di Polewali Mandar yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan buruh, atau yang dikenal sebagai "*sawi*." Mereka adalah nelayan yang mengandalkan hasil laut dengan menggunakan kapal dan alat tangkap milik orang lain. Kedua, para nelayan buruh ini menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketidaksetaraan atau Ketergantungan menjadi fokus utama penelitian ini. Hubungan antara pemilik modal ("*punggawa*") dan buruh nelayan ("*sawi*") diduga tidak seimbang, di mana posisi "*sawi*" sebagai pekerja rentan karena ruang sosial dan ekonomi didominasi oleh pemilik modal.

2.3 Tahap Penelitian

a. Observasi Awal

Langkah pertama dalam penelitian ini dengan melakukan observasi lapangan. Bertujuan untuk memahami secara langsung isu, fenomena, atau kasus yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu problematika praktik sosial masyarakat nelayan di Pambussuang, Polewali Mandar.



Izin Penelitian

Kedua mengurus surat izin penelitian dari pihak-pihak terkait. Ketiga untuk melengkapi dokumen penelitian dan mencegah

potensi masalah selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Proses pengurusan izin penelitian melibatkan beberapa tahapan:

- 1) Pembuatan surat izin penelitian oleh pihak Universitas Hasanuddin dengan tujuan kesbangpol Kota Polewali
- 2) Memasukkan berkas dokumen ke kesbangpol Kota Polewali untuk selanjutnya diberikan surat pengantar ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Polewali
- 3) Memasukkan berkas permohonan izin penelitian ke kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Polewali

c. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, informasi, dan fakta dari para informan. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait problematika praktik sosial masyarakat nelayan di Pambussuang, Polewali Mandar.

a. Tahap evaluasi dan pelaporan

Setelah pengumpulan data dan informasi di lapangan selesai, peneliti melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh. Data yang dianggap valid kemudian dianalisis dan dimasukkan ke dalam laporan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

2.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan analisis konten. Sebagai instrumen utama, peneliti berupaya menggali pengalaman informan secara mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian. Fokus utama pengumpulan data adalah memahami Relasi kuasa punggawa dan sawi dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2024 di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

b. Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data ini diperoleh melalui studi pustaka dan kajian literatur yang relevan dengan penelitian. Bertujuan untuk memperkaya hasil penelitian dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.



umpan balik terhadap data penelitian.

Pemilihan tiga belas informan dalam penelitian ini dilakukan secara cermat berdasarkan relevansi, keakuratan, dan kedalaman informasi yang mereka miliki terhadap fokus penelitian. Peneliti semula berencana untuk menambah jumlah informan agar memperoleh data yang lebih beragam, namun proses wawancara di lapangan menunjukkan adanya tingkat kesamaan informasi yang tinggi (data saturation) di antara para informan. Kondisi ini menandakan bahwa informasi yang diperoleh telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan terhadap permasalahan penelitian. Dengan demikian, Tiga belas informan yang dipilih dianggap telah mewakili keragaman pengalaman dan pandangan masyarakat nelayan di Desa Pambusuang, serta cukup untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Informasi yang mereka berikan menjadi bagian penting dan vital dalam konstruksi analisis empiris serta penyusunan argumen ilmiah dalam tesis ini.

Tabel 2.1
Daftar Narasumber

No.	NAMA	Jenis Kelamin	Umur (TAHUN)	Pekerjaan
1	Muh. Fatahuddin B, S.Pd.I.	L	38	ANGGOTA DPRD POLEWALI MANDAR (PARTAI GOLKAR)
2	Ardan Aras	L	41	ANGGOTA DPRD POLEWALI MANDAR (PARTAI PAN)
3	Ahmad Joko S.in	L	40	PEGAWAI DINAS PERIKANAN POLEWALI MANDAR
4	H. Tiswan	L	58	APARAT DESA PAMBUSUANG, POLEWALI MANDAR (KEPALA DESA)
5	Tasrip	L	48	APARAT DESA PAMBUSUANG, POLEWALI MANDAR (SEKRETARIS DESA)
6	H. Tapsir	L	53	PUNGGAWA DARAT
7	Muh. Ilham	L	47	PUNGGAWA DARAT
8	Sahrin	L	50	PUNGGAWA LAUT
9	Syukur	L	34	PUNGGAWA LAUT
10	Daud	L	25	NELAYAN SAWI
11	Ismail	L	23	NELAYAN SAWI
		L	29	NELAYAN SAWI
		L	37	NELAYAN SAWI



2.6 Prosedur Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara Mendalam (*depth interview*)

Wawancara mendalam digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan persepsi subjek penelitian mengenai interaksi sosial antara buruh nelayan "sawi" dan pemilik kapal "punggawa". Proses wawancara akan bersifat tidak terstruktur, memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi informasi dari informan.

b. Observasi

Untuk mendapatkan pemahaman langsung, peneliti dapat melakukan observasi partisipan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara aktif kegiatan sehari-hari para buruh nelayan "sawi" dan pemilik modal atau kapal "punggawa".

c. Studi Pustaka

Selain mengumpulkan data langsung dari lapangan, peneliti juga akan melakukan studi pustaka. Bertujuan untuk memperdalam landasan teori penelitian dengan menelaah literatur yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, terutama komunitas nelayan.

2.7 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan validitas informasi yang terkumpul. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi, yaitu metode untuk menjamin keabsahan data dengan cara menggabungkan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, dan kesesuaian teori agar saling mendukung dan melengkapi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).⁴³ Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan bukti dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang koheren sesuai dengan tema penelitian. Proses ini, terutama jika tema penelitian didasarkan pada sumber data atau perspektif informan, dapat meningkatkan validitas temuan penelitian (Creswell & Creswell, 2023).⁴⁴

2.8 Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan mengelola dan menyusun data ke dalam kategori, jenis, dan deskripsi dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (Siyoto & Sodik, 2015).⁴⁵



Proses analisis data bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai penyelesaian.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai penyaringan data mentah yang meliputi kegiatan merangkum, memilih poin-poin penting, dan memfokuskan pada aspek relevan dari data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menemukan pola sehingga data menjadi lebih ringkas dan mudah dianalisis. Dalam tahap ini, peneliti mengolah data melalui catatan lapangan, informasi dari informan, serta kajian literatur.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses menampilkan informasi yang terstruktur sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi dan menjadi dasar untuk merencanakan langkah kerja penelitian selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif. Setelah data dikumpulkan, direduksi, dan disajikan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal ini bersifat tentatif dan dapat berubah jika ditemukan bukti atau fakta yang lebih kuat.

